

PERANAN SEKTOR BASIS TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

Meliyanti

Universitas Hasanuddin Makassar

meliyantimely99@gmail.com

Abstract

This study aims to look at the sectors which are included as the base sector in Makassar City as well as indicators of the influence of the manufacturing sector, the construction sector, the wholesale trade and shops sector; repair of cars and motorbikes, as well as the information and communication sector towards local revenue in Makassar City. The data collection technique used in this research is documentation technique. The data source is in the form of secondary data obtained from the Regional Finance and Asset Agency of South Sulawesi Province and the Makassar City Central Statistics Agency. Furthermore, the method used to answer the problems in this study is Location Quotient (LQ) analysis and simple regression analysis. The results of this study indicate that there are 11 sectors identified as basic sectors in Makassar City, namely the manufacturing industry sector; water supply, waste management, waste and recycling; construction; wholesale and retail trade, car and motorcycle repair; providing accommodation and food and drink; information and communication; financial and insurance services; company services; Education services; health services and social activities and other services with an average value of $LQ > 1$. By using a simple regression model, it is found that of the manufacturing sector, the construction sector, the wholesale trade and shops sector; repair of cars and motorbikes, as well as the information and communication sector has a positive and significant effect on PAD in Makassar City.

Keywords : PAD, PDRB, Base Sector

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor-sektor yang termasuk sebagai sektor basis di Kota Makassar serta mengetahui besarnya pengaruh sektor basis industri Pengolahan, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor informasi dan komunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Teknik dokumentasi. Adapun sumber datanya yaitu berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Pusat Statistik Kota Makassar. Selanjutnya, Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan analisis *Location Quotient (LQ)* dan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 11 sektor yang teridentifikasi sebagai sektor basis di Kota Makassar yaitu sektor industri pengolahan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; jasa perusahaan; jasa Pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya dengan nilai rata-rata $LQ > 1$. Dengan menggunakan model regresi sederhana diperoleh bahwa sektor industri Pengolahan, sektor konstruksi, sektor

perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor informasi dan komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Makassar.

Kata Kunci : PAD, PDRB, Sektor Basis.

A. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan Pendapatan Asli Daerah yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 3 yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Jadi, semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh oleh daerah maka akan semakin tinggi kemampuan daerah untuk melaksanakan desentralisasi karena Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang penting bagi daerah (Halim, 2001).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan pemberian otonomi yang seluas-luasnya, berarti pemerintah daerah diharapkan dapat mempersiapkan diri dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian terutama kesiapan pemerintah daerah otonomi dalam menggali sumber-sumber keuangan bagi pembiayaan pembangunan daerahnya.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, disamping dana yang berasal dari pemerintah pusat. Pengusahaan sumber Pendapatan Asli Daerah ini disesuaikan dengan kapasitas daerah berdasarkan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan antara lain melalui usaha mendorong peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat.

Pemerintah daerah berupaya memperdayakan dan mengoptimalkan semua sumber-sumber keuangan daerah secara optimal. Termasuk didalamnya menggali dan menghimpun penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah. Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah sangat dipengaruhi oleh potensi yang dapat digali yang diasumsikan oleh pemilikan sumber daya alam dan manusia. Dengan tuntutan peningkatan kemampuan dan kemandirian daerah ini secara otomatis Pendapatan Asli Daerah juga perlu ditingkatkan untuk membiayai seluruh aktivitas demi kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Cara untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan membangun sektor-sektor perekonomian yang berpotensi. Maka dengan mengetahui dan mengembangkan sektor basis atau sektor yang berpotensi di Kota Makassar, maka perekonomian daerah akan terdorong naik.

Adanya perbedaan potensi ekonomi, sumber daya alam dan manusia akan menimbulkan kesenjangan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dihimpun. Fenomena kesenjangan dan relatif rendahnya penerimaan antar daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah menyebabkan pemerintah daerah sering menghadapi kendala. Adanya ketergantungan yang sangat besar dari daerah baik provinsi maupun kabupaten atau sebaliknya, karena keterbatasan kemampuan daerah dalam membiayai tugas-tugas daerah. Peranan dari bantuan sumbangan

misalnya inflasi yang semakin besar dalam belanja daerah. Kekaburan mengenai tingkat pemerintahan mana yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintah.

Kota Makassar merupakan kota yang mempunyai laju pertumbuhan sangat tinggi dimana kegiatan perekonomian dan pemerintahan terpusat di kota tersebut. Terpusatnya segala kegiatan di kota Makassar yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di kota tersebut yang lebih maju di bandingkan kota-kota yang ada di sekitarnya seperti Maros dan Gowa hal itu dapat ditunjukkan oleh banyaknya industri dan perdagangan yang ada di Kota Makassar. Meningkatnya industri dan perdagangan di Kota Makassar maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Kota Makassar, sehingga pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar menjadikan saya tertarik untuk meneliti. Pendapatan Asli Daerah, dan sumber yang mendukungnya selalu menjadi problem, tidak hanya di masa dulu tetapi juga di masa saat ini ketika otonomi daerah harus dikembangkan secara optimal.

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab ditunjukkan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan, pembiayaan, penyelenggaraan pemerintah di daerah serta pembangunan daerah dengan berlandaskan hukum dan aspirasi dari masyarakat. Usaha pemerintah untuk meningkatkan peranan sumber Pendapatan Asli Daerah dan kemampuan daerah dalam bidang ekonomi keuangan telah lama dicanangkan dan dimulai sejak pelita I, kebijakan ini nampaknya merupakan salah satu cermin dari usaha untuk menciptakan daerah yang lebih otonom tanpa mengabaikan pentingnya hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemberian otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada prinsipnya di maksudkan untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintah pada umumnya. (Insukindro dkk, 1994).

Salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah membangun perekonomian wilayah tersebut agar memiliki daya saing yang tinggi agar terus tumbuh dalam mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain. Dalam melakukan pembangunan ekonomi dibutuhkan berbagai kriteria khusus dalam menentukan sektor-sektor basis atau sektor unggulan. Teori ekonomi basis mengklasifikasikan seluruh kegiatan ekonomi kedalam dua sektor yaitu sektor basis dan sektor non basis. Yang dimaksud kegiatan basis adalah kegiatan suatu masyarakat yang hasilnya baik berupa barang maupun jasa ditujukan untuk ekspor keluar dari lingkungan masyarakat atau yang berorientasi keluar, regional, nasional dan internasional. Dalam kaitannya dengan lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggul jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan dengan lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain di pasar nasional atau domestik. Apabila sektor tersebut menjadi sektor basis (unggulan) sektor tersebut harus mengekspor produknya ke daerah lain, sebaliknya apabila sektor tersebut menjadi sektor non basis (bukan unggulan) sektor tersebut harus mengimpor produk sektor tersebut ke daerah lain (Hendayana, 2003 dalam Elsjamina, 2014).

Douglas C. North dalam Arsyad (1999) menyatakan bahwa sektor ekspor berperan penting dalam pembangunan daerah, karena sektor tersebut dapat

memberikan kontribusi penting kepada perekonomian daerah, yaitu : (a) ekspor akan secara langsung meningkatkan pendapatan faktor-faktor produksi dan pendapatan daerah, dan (b) perkembangan ekspor akan menciptakan permintaan terhadap produksi industri lokal yaitu industri yang produknya dipakai untuk melayani pasar di daerah. Pertumbuhan suatu daerah ditentukan oleh eksploitasi kemanfaatan alamiah dan pertumbuhan basis ekspor daerah yang bersangkutan. Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan tingkat permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja. Cara pengukurannya bisa dilakukan dengan membandingkan harga per unit, tingkat teknologi yang digunakan, nilai tambah yang dihasilkan, kualitas produk dan lain-lain. Dari kegiatan ini tentunya sangat diperlukan untuk dilakukan pemilihan pengembangan sektor usaha apa yang penting untuk dikembangkan di Kota Makassar.

Jika Pemerintah daerah dapat mengelola sektor-sektor ekonominya menjadi sektor basis yang dapat mengekspor hasil produknya hingga ke daerah lain maka Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat seiring dengan meningkatnya hasil produk dari sektor basis tersebut sehingga kemampuan keuangan Pemerintah Kota Makassar dalam pembiayaan daerah dapat terpenuhi secara maksimal. Untuk mengetahui seberapa besar peranan sektor basis daerah Kota Makassar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diperlukan suatu metode yang berguna untuk mengkaji dan memproyeksi pertumbuhan ekonomi. Untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan tindakan apa yang harus diambil untuk mempercepat laju pertumbuhan yang ada.

B. METODE PENELITIAN

Untuk keperluan penelitian ini, penulis memilih objek Kota Makassar sebagai daerah penelitian. Waktu dilaksanakan dari bulan Desember 2020 – Januari 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PDRB Kota Makassar dan Sulawesi Selatan serta Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Teknik sampel ini diambil selama 10 tahun terakhir melalui Badan Pusat Statistik. Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data melalui dokumen atau laporan tertulis lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Pusat Statistik Kota Makassar.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time-series / berkala berdasarkan runtun waktu periode 2010–2019. Sedangkan sumber datanya berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi dan Badan Pusat Statistik Kota Makassar. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Data PAD Kota Makassar selama tahun 2010-2019 dan Data PDRB Kota Makassar atas dasar harga konstan dan Provinsi Sulawesi-Selatan selama tahun 2010-2019. Untuk Metode Analisis Datanya yaitu menggunakan Analisis *Location Quotient* (LQ) dan Analisis Regresi Sederhana.

C. HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Hasil Perhitungan Nilai Location Quotient (LQ) Kota Makassar

Sektor	Analisis LQ										Rata - Rata
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.0290	0.0275	0.0259	0.0263	0.0258	0.0249	0.0239	0.0228	0.0213	0.0213	0.0249
Pertambangan dan Pengalangan	0.0006	0.0004	0.0003	0.0002	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	9.0259	0.0002
Industri Pengolahan	1.5613	1.4966	1.4848	1.4597	1.4453	1.4358	1.4271	1.4323	1.4045	1.3685	1.4516
Pengadaan Listrik dan Gas	0.5100	0.4890	0.4930	0.4767	0.4865	0.4685	0.4619	0.4591	0.4636	0.4682	0.4776
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.9036	1.8154	1.8286	1.8532	1.8425	1.8380	1.7700	1.7374	1.7277	1.6415	1.7958
Konstruksi	1.3556	1.3091	1.3212	1.3084	1.3602	1.3582	1.3644	1.3478	1.3349	1.3116	1.3371
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.4300	1.4594	1.3870	1.3641	1.3707	1.3554	1.3408	1.3243	1.3103	1.3194	1.3661
Transportasi dan Pergudangan	0.7494	0.7004	0.6625	0.6612	0.6968	0.6833	0.6590	0.6557	0.6384	0.6748	0.6782
Penyediaan Akomodasi dan Makan	1.7544	1.7349	1.7003	1.7039	1.6876	1.6877	1.6780	1.6147	1.5975	1.5713	1.6730

Minum												
Informasi dan Komunikasi	1.8784	1.8968	1.8354	1.8038	1.8051	1.8195	1.8311	1.8026	1.7941	1.7253	1.8192	
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.6344	1.6281	1.6186	1.6000	1.5973	1.5915	1.5745	1.5815	1.5713	1.5364	1.5933	
Real Estate	1.0777	1.0388	1.0182	1.0109	1.0255	1.0277	0.9809	0.9516	0.9370	0.9182	0.9986	
Jasa Perusahaan	2.6329	2.5756	2.5563	2.5628	2.5649	2.5373	2.4800	2.4555	2.4279	2.4268	2.5220	
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.7420	0.7427	0.7239	0.7058	0.7014	0.7221	0.7034	0.7006	0.7332	0.7057	0.7181	
Jasa Pendidikan	1.6928	1.6541	1.6560	1.6618	1.6827	1.6882	1.6882	1.6746	1.6647	1.6305	1.6694	
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.4322	1.4159	1.3629	1.3428	1.3324	1.3101	1.3166	1.3174	1.3278	1.3222	1.3480	
Jasa lainnya	1.9656	1.9708	1.9639	1.9500	1.9500	1.9089	1.8904	1.8703	1.8542	1.8369	1.9161	

Berdasarkan hasil analisis nilai rata-rata *Location Quotient* terhadap 17 sektor perekonomian di Kota Makassar tahun 2010-2019, dapat diketahui bahwa terdapat 11 sektor yang teridentifikasi sebagai sektor basis yaitu sektor industri pengolahan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; jasa perusahaan; jasa Pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya dengan nilai rata-rata $LQ > 1$. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Makassar telah mampu memenuhi sendiri kebutuhannya disektor tersebut dan dimungkinkan untuk melakukan ekspor ke luar daerah barang dan jasa pada sektor ini. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dengan adanya ekspor maka Kota Makassar akan memperoleh pendapatan. Dengan adanya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di Kota Makassar, dan

pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru.

Sedangkan beberapa sektor lainnya termasuk sektor non basis dengan nilai rata-rata $LQ < 1$ yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; pengadaan listrik dan gas; transportasi dan pergudangan; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib, sehingga menyebabkan sektor-sektor ini mempunyai kecenderungan untuk impor dari daerah (provinsi) lain.

No.	Tahun	Realisasi PAD (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1	2010	210,136,331,091	96,87%
2	2011	351,692,552,589	101,84%
3	2012	491,067,365,847	111,29%
4	2013	619,593,144,215	108,75%
5	2014	730,988,641,341	87,89%
6	2015	828,871,893,345	83,54%
7	2016	971,859,753,606	75,57%
8	2017	1,163,402,240,700.68	78,35%
9	2018	1,185,453,010,990	78,85%
10	2019	1,235,218,976,009.38	76,02%
Total		7,788,283,909,734.06	89,89%

Sumber : BKAD Prov. Sul-Sel, Data Diolah.

Pertumbuhan penerimaan PAD Kota Makassar rata-rata setiap tahunnya mengalami pertumbuhan sebesar 89,89 persen. Salah satu penyebab terjadinya penurunan penerimaan PAD dikarenakan adanya penurunan dari sumber-sumber penerimaan PAD baik itu pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah, hal ini terjadi karena adanya pajak dan retribusi daerah yang cukup beragam namun hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan serta kemampuan masyarakat untuk membayar pajak masih rendah serta diikuti BUMD belum banyak memberikan keuntungan terhadap pemerintah daerah. Untuk pertumbuhan PAD tertinggi terjadi pada tahun ketiga penelitian yaitu tahun 2012 penerimaan PAD tumbuh sebesar 111,29 persen. Hal tersebut disebabkan oleh mulai intensifnya Pemerintah Kota Makassar atau instansi yang terkait yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memungut dan memaksimalkan penerimaan PAD.

D. PEMBAHASAN

Berdasarkan Teori basis ekonomi yang dikemukakan oleh Richardson (1997) menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Artinya semakin besar ekspor atau permintaan akan barang di suatu wilayah ke wilayah lain akan menandakan semakin majunya pertumbuhan wilayah tersebut. Berhasil tidaknya pembangunan daerah tergantung dari pertumbuhan ekonomi dari

tahun ke tahun, yang dapat ditunjukkan melalui nilai PDRB. Jika dilihat dari Distribusi Persentase, terdapat empat sektor yang kontribusinya paling besar yaitu didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta Sektor Informasi dan Komunikasi.

Nilai Produksi Sektor Industri Pengolahan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Terbukti dengan semakin meningkatnya bisnis perdagangan dengan dibangunnya mall-mall dan menjamurnya warung-warung modern seperti indomaret, Alfamidi dan lain sebagainya, hotel dan restoran.

Sektor Konstruksi berpengaruh secara signifikan terhadap PAD Kota Makassar, dimana keberadaannya juga menjadi tulang punggung dan mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar itu sendiri. Terbukti dengan adanya peran sektor konstruksi yaitu membangun infrastruktur sebagai penyediaan sarana dan prasarana yang sudah lengkap dan bagus dalam rangka meningkatkan produktivitas, kesempatan kerja dan laju perekonomian akan mendatangkan daya tarik masyarakat untuk memanfaatkannya sehingga nilai kontribusi atau nilai tambah untuk jasa-jasa terus mengalami peningkatan. Dimana Sektor konstruksi masih memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi dengan begitu dapat mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.

Sektor Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih cukup menjanjikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar karena nilai produksi Sektor Perdagangan ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup stabil. Ini dikarenakan semakin semakin meningkatnya bisnis perdagangan dengan dibangunnya mall-mall dan menjamurnya warung-warung modern seperti indomaret, Alfamidi dan lain sebagainya, hotel dan restoran.

Sektor Informasi dan Komunikasi diketahui mendukung hampir semua kegiatan usaha. Beberapa yang tergolong pada sektor ini, antara lain aktivitas penerbitan, produksi multimedia, penyiaran dan pemrograman, telekomunikasi, dan aktivitas jasa informasi di internet. Nilai Produksi Sektor Informasi dan Komunikasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan juga kontribusinya terus mengalami peningkatan ini dikarenakan penggunaan data internet untuk media sosial, transaksi online, dan sebagainya terus meningkat.

E. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini Sektor basis sebagai variabel bebas dan PAD Kota Makassar sebagai variabel terikat. Dimana dari pengujian tersebut menyimpulkan bahwa sektor basis Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Serta Sektor Informasi dan Komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Makassar.

Berdasarkan dari hasil perhitungan LQ terhadap 17 sektor perekonomian di Kota Makassar dengan menggunakan indikator PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010-2019, terdapat 11 sektor yang teridentifikasi sebagai sektor basis yaitu Sektor Industri Pengolahan; Sektor Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang; Sektor Konstruksi; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Sektor Informasi

dan komunikasi; Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi ; Sektor Jasa Perusahaan; Sektor Jasa Pendidikan; Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Sektor Jasa lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa Kota Makassar telah mampu memenuhi sendiri kebutuhannya disektor tersebut dan dimungkinkan untuk melakukan ekspor ke luar daerah barang dan jasa pada sektor ini.

Saran

Bagi Pemerintah Kota Makassar. Pemerintah daerah Kota Makassar diharapkan bisa membuat alur kebijakan yang mensupport perkembangan dan kemajuan sektor ekonomi yang menjadi sektor basis untuk mendorong dan merangsang pertumbuhan sektor-sektor yang lain. Sehingga kontribusi sektor tersebut semakin tinggi terhadap PDRB Kota Makassar dan mampu pula menjadi acuan pertumbuhan ekonomi yang akan berefek positif pada pembangunan ekonomi daerah Kota Makassar.

Bagi Peneliti. Penelitian ini masih sangat terbatas serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya, untuk bisa melengkapinya perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam terutama yang berhubungan langsung langsung dengan komoditas sektor basis dan subsektor unggulan sehingga dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih fokus dan akurat.

REFERENSI

- Abdul Halim. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN
- Ambardi, Urbanus M dkk.2002. *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah*. Pusat pengkajian kebijakan pengembangan wilayah (P2KTPW – BPPT). Jakarta
- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE-UGM
- (BPS), Badan Pusat Statistik. "Jumlah Kelurahan menurut Kecamatan di Kota Makassar". Makassar, 2019.
- (BPS), Badan Pusat Statistik. "Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kota Makassar". Makassar, 2019.
- (BPS), Badan Pusat Statistik. "PDRB Kota Makassar atas Dasar harga Konstan Tahun 2010-2019". Makassar, 2019.
- Badan Pendapatan Daerah. "Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar". Makassar 2019.
- Departemen Pertanian, 2005. *Balai Besar Penelitian & Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Balai Penelitian Tanah. Departemen Pertanian. Jakarta
- Devas, dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Emilia dan Amilia. 2006. *"Modul Ekonomi Regional"*. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Jambi, Jambi.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghufron, Muhammas, 2008. *Analisis Pembangunan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur*, Skripsi, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

- Glasson, J. (1997). *Pengantar Perencanaan Regional, diterjemahkan Paul Sitohang*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hendayana, Rachmat. 2003. *Aplikasi Metode Location Quotient (LQ) dalam Penentuan Sektor Basis Komoditas Unggulan*. Informatika Pertanian vol. 13 Desember
- Insukindro, Mardiasmo dkk. (1994). *Peranan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam usaha peningkatan PAD*. Laporan hasil penelitian KKD. Yogyakarta: FE UGM.
- Irawan dan Suparmoko, M. 1982. *Ekonomi Pembangunan*. BPFE, Yogyakarta.
- Jhingan, M.L. 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Cetakan ke-8. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Kaho, Josef Riwu. 1988. *Prospek Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Garafindo
- Kuznets, Simon. 1995. *"Economy Growth and Income Inequality"*. American Economic Review
- Poerwadarminta, W.J.S. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka
- Richarson, H. W 1977. *Dasar-dasar ilmu ekonomi regional terjemahan paul sitohang*. Jakarta: Lembaga penerbit FI UI.
- Sadono, Sukirno. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Saharuddin, S. 2005. *Pengaruh perkembangan Ekonomi Terhadap Penerimaan APBD dan kesejahteraan Rakyat di Wilayah Sulawesi Selatan*. Di sertai tidak diterbitkan. Makassar : Program Pascasarjana-UNHAS
- Soemitro, Rochmat. 1977. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*.1944. Bandung: PT. Eresco.
- Tarigan, Robinson. 2005 *"Perencanaan Pembangunan Wilayah (edisi revisi)"*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tiebout, C. 1962. The Community Economic Base Study. Committee for Economic Development, Supplementary Paper No.16 Chapters 5-7